



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

Nomor : 719/S.SIMNAS/X/01/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Undangan Simposium Nasional/Bimtek

Jakarta, 17 Januari 2025

Kepada Yth,-
Ibu Dra. Firdaus
Ketua DPRD Kota Kediri
Di,-

T e m p a t,-

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK sebagai lembaga Negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai *Supreme Audit Institution*, maka kerja sama yang efektif dan profesional dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang merupakan sebuah aplikasi atau *dashboard* yang dikembangkan KPK untuk melakukan *monitoring* capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Oleh karena itu, BPK berkontribusi dalam pencapaian tujuan Negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, BPK akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Berdasarkan pertimbangan banyaknya program pemerintah dan terbatasnya sumber daya pemeriksaan, BPK harus menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara berdasarkan aspek kesesuaian rekomendasi dengan temuan dan aspek implementatif rekomendasi.

Selanjutnya, BPK perlu meningkatkan sinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan profesional dengan cara berkolaborasi dengan organisasi profesi. Visi BPK “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara” akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan Negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan Negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara, serta melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, serta penyelesaian ganti kerugian Negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”. Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian Negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

B. Tema *Simposium* / Bimtek

Dalam *Simposium* Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “**Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara melalui Sinkronisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)**”, yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal BPK c.q Badiklat PKN bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, serta *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), dengan tujuan mewujudkan sinergitas sebagai lembaga Negara yang independen bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kerugian Negara dan lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK.

C. Waktu dan Tempat

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu s.d Kamis, 19 – 20 Februari 2025

Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 14.45 WIB (selesai)

Tempat : **Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah (The Grand Ballroom)**

Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Pd. Pinang, DKI Jakarta 12310

Agenda : Terlampir

Dress Code : Hari pertama pakaian batik dan wanita menyesuaikan
Hari kedua pakaian non-formal

D. Peserta dan Biaya

Demi sukseskan kegiatan ini, setiap peserta *Simposium* Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk PPN 11%, akomodasi Hotel/Penginapan, ruang *meeting*, *coffee break*, perlengkapan *simposium*, narasumber, dokumentasi kegiatan, penggandaan materi, dan konsumsi selama acara.

Kontribusi kegiatan dapat ditransfer ke **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No: 1153-01-023705-50-6 Bendahara Panitia Badiklat PKN - ACFE a.n Yesi Septiani SE, Kantor Cabang Bekasi**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir/absensi peserta. Sesuai keputusan bersama sistem transaksi pembayaran hanya dapat dilakukan secara non-tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Jenderal – Badiklat PKN**

Dedy Lesmana Mandala, S.E., M.M., Ak, CFE. HP 0811185587

Hesti Kusumaningrum, S.E., M.Si., Ak., CSFA. HP 0811115565 / 0811275959 (Whatsapp)

Dadang Engkus Gumelar, S.E., M.Pd., CSFA. HP 0811233737

Biro Humas dan KSI Fax. 021 – 57944000 / 0251 - 7948191

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepada : **Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN**



Raden Yudi Ramdan B, SE, MM, Ak, CA
1970 011 03199103 1 003



Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia *Simposium* Nasional/Bimtek

Baktiar Arif, SE, M.Fin, AK, CPA, CSFA
1970-050 5199003 1 001



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK BADIKLAT PKN - ACFE

Sesi-1 Rabu, 19 Februari 2025

Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah (The Grand Ballroom)
Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Pd. Pinang, DKI Jakarta 12310

TEMA : “Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara melalui Sinkronisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah (The Grand Ballroom)
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Simposium/Bimtek</i>	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal BPK	Bahtiar Arif, SE, M.Fin, Ak, CSFA	
09.25 – 09.40	Keynote Speech dan Pembuka <i>Simposium/Bimtek</i>	Ketua BPK Dr. Isma Yatun, CSFA, CFArA	
09.40 – 09.55	COFFEE BREAK		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. (Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat RI Koordinator Bidang Korpolkam) 2. Perspektif Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025: Drs. Muhammad Tito Karnavian MA., Ph.D. (Menteri Dalam Negeri RI) 3. Perspektif UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Monitoring Center for Prevention (MCP): Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFArA., QGIA., CGCAE. (Wakil Ketua KPK RI) 4. Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Dr. Luky Alfirman, S.T., MA. (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI) 5. Perspektif DPD RI Mengawasi Sinergitas yang Terjalin antar Pemerintah Daerah dan Mitranya untuk Kepentingan Nasional: Andiara Aprilia Hikmat, S.I.Kom. (Ketua Komite I DPD RI)	Moderator: Pengamat Politik Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. (Peneliti Politik Senior BRIN)	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK BADIKLAT PKN – ACFE

Sesi-2 Kamis, 20 Februari 2025

Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah (The Grand Ballroom)
Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Pd. Pinang, DKI Jakarta 12310

TEMA : “Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara melalui Sinkronisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah (The Grand Ballroom)
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Simposium/Bimtek</i>	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal BPK	Bahtiar Arif, SE, M.Fin, Ak, CSFA	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Simposium/Bimtek</i>	Ketua BPK Dr. Isma Yaton, CSFA, CFA	
09.40 – 09.55	<i>COFFEE BREAK</i>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Permenpan RB No. 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah: Rini Widyantini, S.H., M.P.M. (Menteri PANRB RI) 2. Perspektif Peraturan BPKP No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri bagi Pemda: Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI) 3. Perspektif Permenko No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional: Dr. Edi Prio Pambudi, SE., MA. (Deputi II Kemenko Bidang Perekonomian RI) 4. Perspektif PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Dr. Al Muktabar, M.Sc. (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan Kemensetneg RI) 5. Perspektif Mewujudkan Edukasi Berpolitik untuk Kepentingan Nasional: Prof. A. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D. (Guru Besar Ekonomi UGM)	Moderator: Pengamat Politik Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. (Peneliti Politik Senior BRIN)	
12.45 – 13.45	<i>BREAK</i>		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Badiklat PKN – ACFE	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak Badiklat PKN – ACFE	

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (tentatif)
Penyelenggaraan Simposium Nasional/Bimtek mengacu pada aturan dan undangan.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7975359 Fax. (021) 7948191

FORMULIR PENDAFTARAN *SIMPOSIUM* NASIONAL/BIMTEK

“Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara melalui Sinkronisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”
19 – 20 Februari 2025

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta *Symposium* Nasional/Bimtek dua hari kerja sama Badiklat PKN – ACFE.

.....2025
Peserta,

1. Pendaftaran peserta dan konfirmasi pembayaran paling lambat hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 sebelum pelaksanaan kegiatan *simposium* nasional/bimtek.
2. Formulir pendaftaran dan bukti pembayaran biaya peserta diharapkan dapat dikirim melalui whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia tidak melayani dan menerima peserta *simposium*/bimtek yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
4. Dokumen surat *Invoice*/kwitansi asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Panitia *Symposium* Nasional / Bimtek

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PKN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750

Telepon (021) 7975359 Faksimili (021) 7948191

Email: badiklatpkn.sekjen@gmail.com

Dedy Lesmana Mandala, S.E., M.M., Ak., CFE. HP 0811185587

Hesti Kusumaningrum, S.E., M.SI., Ak., CSFA. HP 0811115565 / 0811275959 (Whatsapp)

Dadang Engkus Gumelar, S.E., M.Pd., CSFA. HP 0811233737





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7975359 Fax. (021) 7948191

KWITANSI
RECEIPT

No. : 057/S/XXVII.2/01/2025
Number

Telah terima dari : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri
Received From

Sejumlah uang :
Amount received

Untuk pembayaran: () Peserta *Simposium* Nasional/Bimtek dua hari dengan biaya kontribusi
In payment of setiap peserta Rp. 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada hari
Rabu s.d Kamis Tanggal 19 – 20 Februari 2025 di Hotel InterContinental Jakarta
Pondok Indah (The Grand Ballroom) Tema “Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK
sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Pengelolaan Pertanggung-
jawaban Keuangan Negara melalui Sinkronisasi Peraturan UU No. 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”

Jakarta, 18 Januari 2025

Jumlah Rp.

Catatan :

- Kontribusi peserta kegiatan ditransfer ke rekening
Bank BRI Kantor Cabang Bekasi
A/C 1153-01-023705-50-6
a.n Yesi Septiani SE
Bendahara Panitia Badiklat PKN – ACFE
- Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



Arkadewi Sri Rahayu, SE, MM
Kepala Subbagian Keuangan